

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL UANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGA UTARA (STUDI KASUS: DESA TELUK BARU DAN DESA TELUK SARI)

Lisa¹, Ni Made Musiyani Anjasmari², Herry Febriadi³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: lisa210624@gmail.com

ABSTRAK

“Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metodologi penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, dengan melibatkan 13 informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan jika efektivitas program bantuan sosial uang di Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dikategorikan Kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: *Pertama*, Pengetahuan masyarakat terhadap program masih rendah, meskipun koordinasi antar pelaksana program berjalan cukup efektif. *Kedua*, Ketepatan penerima program Desa Teluk Baru kurang efektif, sedangkan Desa Teluk Sari cukup efektif. Namun Mekanisme penentuan sasaran belum optimal. *Ketiga*, ketepatan waktu penyaluran bantuan dinilai kurang efektif. Sementara proses pelaksanaan cukup efektif. *Keempat*, tercapainya tujuan program serta Kesesuaian harapan dinilai cukup efektif. *Kelima*, dampak program dan tingkat kebermanfaatannya tergolong cukup efektif. Faktor pendukung Kerja sama dan koordinasi antar pelaksana serta pembagian peran yang jelas, sementara faktor penghambat rendahnya pemahaman masyarakat, keterlambatan penyaluran bantuan serta keterbatasan kuota penerima. Untuk meningkatkan efektivitas program, kepala Dinas Sosial mengoptimalkan pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, mengevaluasi kebijakan kuota penerima agar ketepatan sasaran program lebih optimal, dan kejelasan jadwal penyaluran bantuan, serta kepada Kepala pemerintah desa lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat”.

Kata Kunci: Efektivitas, Bantuan Sosial Uang, kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

“*The purpose of this study is to determine the effectiveness of the Cash Social Assistance Program in Teluk Baru Village and Teluk Sari Village and the factors influencing it. This study uses a descriptive qualitative approach involving 13 informants selected through purposive sampling. The results show that the effectiveness of the Cash Social Assistance Program in Teluk Baru Village and Teluk Sari Village, Amuntai Selatan District, Hulu Sungai Utara Regency, is categorized as less effective. This can be seen from several indicators. First, public knowledge of the program remains low, although coordination among program implementers is relatively effective. Second, the accuracy of beneficiary targeting in Teluk Baru Village is considered less effective, while in Teluk Sari Village it is fairly effective; however, the targeting mechanism has not been optimal. Third, the timeliness of assistance distribution is considered less effective, while the implementation process is fairly effective. Fourth, the achievement of program objectives and the alignment of outcomes with expectations are considered fairly effective. Fifth, the program's impact and level of benefits for recipients are considered fairly effective. Supporting factors include cooperation and coordination among implementers and clear role distribution, while inhibiting factors include low public understanding, delays in assistance distribution, and limited recipient quotas. To improve program effectiveness, regency government should evaluate recipient quota policies to improve targeting accuracy, the Social Affairs Office should optimize the updating of the Integrated National Socio-Economic Data and clarify distribution schedules, and the village governments should enhance program socialization*”.

Keyword: Effectiveness, Cash Social Assistance, Community Welfare

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat ialah tujuan utama dalam pembangunan nasional. Upaya pemerintah dalam memperkuat sistem kesejahteraan sosial tercermin melalui peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang memberikan arah dan pedoman pelaksanaan kebijakan sosial agar lebih terarah, terencana, dan berkeadilan. Regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyaluran bantuan sosial.

Berbagai kebijakan yang diterapkan diharapkan mampu memastikan jika bantuan sosial disalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, serta tepat waktu, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Salah satu bentuk perlindungan sosial yang menonjol saat ini yakni program bantuan sosial uang yang disalurkan selama sepuluh bulan dengan nominal Rp200.000 per bulan. Program ini ditujukan pada kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), di mana memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.

Bantuan sosial uang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sekaligus memelihara daya beli masyarakat, khususnya ditengah kondisi ekonomi yang rentan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial, berperan penting dalam proses penyaluran bantuan sosial, penyaluran tersebut didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah desa Setempat.

Peran ini tidak hanya sebatas penyaluran bantuan melainkan juga mencakup upaya memastikan ketepatan sasaran, keberlanjutan manfaat yang diterima serta mendorong agar bantuan sosial uang agar dapat menjadi stimulan kemandirian ekonomi keluarga penerima. Sebagian besar penerima dari kelompok masyarakat miskin dan rentan, sehingga diperlukan mekanisme penyaluran secara *door to door* supaya bantuan benar-benar diterima pada yang berhak. Namun, kondisi tersebut juga menimbulkan tantangan tersendiri, baik dari sisi ketepatan sasaran ataupun efektivitas pendampingan sosial.

Jumlah penerima bantuan di tiap desa relatif kecil terbatas karena penyaluran bantuannya di fokuskan pada katagori masyarakat rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa. Pada tahun 2025, jumlah penerima bantuan sosial uang di desa Teluk baru tercatat sebanyak 5 orang, sedangkan di Desa Teluk Sari sebanyak 6 orang. Bantuan itu bersumber dari APBD murni.

Berdasarkan observasi awal, program Bantuan Sosial Unag di Desa Teluk Baru dan Desa Teluk sari, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan jika sebagian penerima bantuan belum sepenuhnya memahami tujuan program. Selain itu, bantuan sosial uang belum dimanfaatkan secara optimal dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara menyeluruh. Proses verifikasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional masih berlangsung, sementara jadwal penyaluran bantuan belum tersusun secara konsisten pada tiap tahap. Di sisi lain, masih terdapat bantuan tanpa disertai upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Penelitian terdahulu oleh (Normila et al., 2024) dari Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, "Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara". Hasil penelitian ini cukup efektif, Tetapi pelaksanaannya masih belum optimal. Kendala utama meliputi kurangnya sosialisasi,

ketidaktepatan sasaran penerima, dan pencairan dana yang tidak tepat waktu. Meskipun demikian, koordinasi pelaksanaan dan proses penyaluran BLT berjalan dengan baik serta mampu memudahkan mencukupi kebutuhan masyarakat, tetapi belum memberikan perubahan kesejahteraan yang signifikan secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian terdahulu oleh (Hidayat et al., 2025) dari Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dalam penelitian di mana judulnya “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Penelitian menemukan hasil jika Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dinilai kurang efektif. karena disebabkan oleh ketidaktepatan data penerima, kurangnya sosialisasi, ketidakpastian jadwal penyaluran, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi program. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung berupa kerja sama antar pihak, komitmen pemerintah, dan sebagian besar penerima yang sesuai sasaran.

Kebijakan Publik

Menurut Frank Jefkins dalam (Ida Syafriyani, S.Sos., 2023) publik ialah sekelompok atau individu berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal ataupun eksternal. Publik ialah terkait orang atau masyarakat dimiliki masyarakat serta berkorelasi dengan atau mempengaruhi suatu bangsa, negara atau komunitas. Publik bisa diartikan sebagai:

- 1). Umum
- 2). Masyarakat
- 3). Negara atau pemerintah

Kebijakan publik ialah peraturan yang ditentukan atau dibuat oleh orang yang mempunyai kekuasaan dengan tujuan memberikan pelayanan pada publik. jika diibaratkan kebijakan publik ialah suatu hukum yang harus ditaati, jadi teruntut siapapun yang melanggar akan memperoleh sanksi ataupun hukuman sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Kebijakan publik menurut Thomas R.Dye dalam (Ida Syafriyani, S.Sos., 2023) mengatakan jika kebijakan publik ialah apapun yang dipilih oleh pemerintah guna dijalankan atau tidak (*Whatever governments choose to do or no to do*).

Sementara menurut David Eason dalam (Ida Syafriyani, S.Sos., 2023) kebijakan publik diartikan selaku pengalokasian nilai-nilai kekuasaan teruntut semua masyarakat yang keberadaannya mengikat.

Tahapan dan Proses Kebijakan Publik

Dalam Buku Kebijakan dan Pelayanan publik oleh (Dr. Drs. Kurhayadi & Dr. Deden Hadi Kusnandar, S.Si., 2023) tahapan dan proses kebijakan publik bisa berbeda-beda tergantung pada kontes, isu, serta lingkup kebijakan yang dibahas.

Namun, secara umum tahapan dan proses kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Identifikasi Masalah

Tahap pertama dalam perumusan kebijakan ialah mengidentifikasi masalah atau isu yang perlu ditangani oleh pemerintah atau masyarakat. Identifikasi masalah bisa dilakukan oleh pemerintah, kelompok masyarakat, atau pakar.

2) Perumusan Kebijakan

Sesudah masalah diidentifikasi, pemerintah akan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut. Proses perumusan kebijakan meliputi pengumpulan data, analisis kebijakan yang ada, konsultasi dengan para ahli, dan dialog dengan masyarakat atau kelompok terkait.

3) Penetapan Kebijakan

Sesudah proses perumusan kebijakan selesai, kebijakan tersebut akan ditetapkan dalam bentuk keputusan atau peraturan yang resmi. Kebijakan ini biasanya dibuat oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab, seperti Kementrian, Badan, atau Lembaga Negara.

4) Implementasi Kebijakan

Tahap selanjutnya ialah implementasi kebijakan, yakni pelaksanaan kebijakan dalam praktik. Implementasi kebijakan melibatkan bermacam pihak, misalnya pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lain-lain, yang bertugas guna menjalankan program atau kebijakan yang sudah ditetapkan.

5) Evaluasi Kebijakan

Tahap terakhir ini dilaksanakan guna menganalisis seberapa jauh kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Hasil evaluasi ini bisa digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki atau memperbaharui kebijakan yang ada.

Efektivitas

Menurut Simamora dalam (Muh. Yusri Abadi, SKM et al., 2021) efektivitas ialah tingkat dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya ialah konsep yang lebih luas di mana meliputi bermacam faktor di dalam ataupun di luar diri individu. Jadi, efektivitas tidak hanya tampak dari sisi produktivitas, melainkan juga tampak dari sisi persepsi atau sikap individu. Sementara menurut Makmur dalam (Muh. Yusri Abadi, SKM et al., 2021) mengemukakan jika efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan, kebenaran, serta kesalahan dari suatu organisasi. Kemudian guna menatapkin tingkat efektivitas keberhasilan organisasi atau kelompok ataupun negara kita harus membuat perbandingan dengan kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan. Makin rendah tingkat kesalahan yang terjadi, tentu akan makin dapat mendekati ketepatan dalam melaksanakan pelaksanaan tiap aktivitas atau pekerjaan yang dibebankan.

Perihal itu relevan dengan pendapat Pasaribu dalam (Muh. Yusri Abadi, SKM et al., 2021) di mana mengemukakan jika biasanya efektivitas hanya bersumber dari evaluasi atas kesalahan atau kekeliruan yang sudah dilaksanakan di masa lalu, dipadukan dengan. efektivitas berpikir secara rasional, lalu mengaplikasikan pemikiran itu ke suatu tindakan yang lebih cepat, sehingga tujuan yang hendak dicapai itu bisa memberikan hasil yang memuaskan semua pihak selaku anggota individu, kelompok ataupun selaku anggota organisasi.

Dari bermacam sudut pandang yang sudah dipaparkan, para peneliti menyimpulkan jika Efektivitas pada dasarnya menggambarkan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Keberhasilan tersebut tidak hanya dinilai dari hasil akhir, melainkan juga dari ketepatan proses pelaksanaan, sikap, serta kemampuan individu atau organisasi dalam meminimalkan kesalahan melalui evaluasi dan penerapan tindakan yang lebih rasional, sehingga tujuan dapat dicapai secara optimal.

Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas bukanlah hal yang mudah, sebab tiap individu dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap tingkat keberhasilan suatu program atau organisasi. Namun demikian, efektivitas umumnya tampak dari seberapa jauh suatu organisasi bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, diperlukan indikator atau alat ukur yang jelas agar efektivitas dapat dievaluasi secara lebih objektif.

Dalam mengukur efektivitas, Gibson dalam (Monica Feronica Bromasa, S.Sos., 2022) mengemukakan beberapa indikator, yakni:

1) adanya tujuan yang dirumuskan secara jelas

- 2) tersedianya strategi yang terencana guna mencapai tujuan
- 3) proses perumusan kebijakan yang dilakukan secara matang
- 4) perencanaan yang disusun dengan baik
- 5) program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan
- 6) ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
- 7) sistem pengawasan sekaligus manajemen yang berjalan secara efektif dan berorientasi pada pengembangan

Program Bantuan Sosial Uang

Program ialah serangkaian aktivitas yang dirancang secara sistematis sekaligus dilaksanakan secara terencana serta berkelanjutan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan atau dampak tertentu. Program tidak dijalankan hanya sekali, tetapi berlangsung terus-menerus dan melibatkan bermacam pihak dalam pelaksanaannya. Dalam kebijakan sosial, Bantuan Sosial Uang menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah berupa bantuan uang tunai pada masyarakat miskin atau rentan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Selain sebagai bantuan jangka pendek, Bantuan Sosial Uang juga diarahkan sebagai bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dasar Hukum Bantuan Sosial Uang

Pelaksanaan program bantuan sosial uang di Indonesia dilandaskan pada kerangka kebijakan kesejahteraan sosial yang diatur dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 2009) serta (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 2009). Selain itu, mekanisme penyaluran bantuan juga mengacu pada (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, 2017) yang menekankan penyaluran bantuan sosial secara non tunai sebagai upaya meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program.

Tujuan Program Bantuan Sosial Uang

Tujuan pelaksana program bantuan sosial uang antara lain sebagai berikut :

- 1) Membantu masyarakat miskin dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.
- 2) Mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama dalam kondisi darurat atau krisis.
- 3) Menjaga daya beli masyarakat miskin agar tetap stabil.
- 4) Mendorong kemandirian ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- 5) Menjadi wujud kehadiran negara dalam melindungi warga yang terdampak secara sosial dan ekonomi.

Kesejahteraan Masyarakat

kesejahteraan masyarakat ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar individu dan keluarga, baik dalam aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, ataupun lingkungan. Kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi seperti pangan dan perumahan, tetapi juga mencakup kesehatan fisik, rasa aman, kebebasan dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta pemenuhan aspek sosial dan spiritual. Peran pemerintah melalui kebijakan dan program sosial juga sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE

Poerwandari dalam (Amalia Adhandayani, S.Psi., 2020) menyatakan jika penelitian ini memakai teknik deskriptif kualitatif untuk meneliti fenomena dan kesulitan yang dihadapi oleh topik penelitian. Penelitian ini memusatkan perhatian pada metode-metode tertentu untuk menganalisis data kualitatif dalam hal pengumpulan data. Tiga belas informan menjadi sumber data dalam penelitian ini, yang memakai pendekatan Purposive Sampling. Penelitian ini memakai teori pengukuran efektivitas menurut Edy Sutrisno yang dijelaskan dalam (Amrizal et al., 2018). Teori ini mencakup pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, dan perubahan nyata. Miles, Huberman, dan Saldania menyatakan jika reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan ialah tiga langkah utama dalam analisis data dalam (Sugiyono, 2022). Uji Kridibilitas penelitian diperiksa dengan, perpanjangan pengamatan, meningkatkan pengamatan, memakai triangulasi, menganalisis kasus negatif, memakai bahan referensi, dan melaksanakan member *check* dalam (Sugiyono, 2022).

PEMBAHASAN

A. “Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari)”

Efektivitas suatu program tampak dari seberapa jauh tujuan yang sudah ditentukan bisa dicapai. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (dalam Endrawati, 2023:10) yang mengemukakan jika efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi atau program dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, Edy Sutrisno dalam Dedi Amrizal, dkk. (2018:43) mengemukakan beberapa indikator efektivitas, yakni pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, serta adanya perubahan nyata. Berdasarkan indikator tersebut, berikut pembahasan hasil penelitian di Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari.

1. Pemahaman Program

Pemahaman program ialah indikator penting dalam menilai efektivitas program bantuan sosial uang. Tingkat pemahaman masyarakat mencerminkan sejauh mana penerima mengetahui tentang program yang dilaksanakan.

a. Pemahaman Masyarakat Terhadap Program

Pemahaman masyarakat terhadap program ditunjukkan melalui pengetahuan mereka mengenai adanya Program Bantuan Sosial Uang serta informasi yang diperoleh melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pengetahuan tersebut mencakup tujuan program, persyaratan penerima, dan bentuk bantuan yang diberikan.

Dari hasil wawancara dan observasi, pemahaman masyarakat terhadap program masih tergolong kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kegiatan sosialisasi serta kurangnya informasi yang disampaikan secara menyeluruh oleh pihak pelaksana, sehingga tidak semua masyarakat memahami program secara baik.

b. Kordinasi Pelaksanaan Program

bertujuan untuk menyatukan bermacam pihak yang terlibat agar Program Bantuan Sosial Uang dapat berjalan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan jika koordinasi pelaksanaan program antar pelaksana di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten dinilai cukup efektif. Meskipun

demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan komunikasi serta perbedaan data yang berpotensi memengaruhi kelancaran pelaksanaan program..

2. Tepat Sasaran

Ketepatan sasaran menggambarkan sejauh mana Program Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Suatu program dikatakan tepat sasaran apabila bantuan disalurkan pada kelompok yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan serta mampu memberikan manfaat dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar penerima.

a. Ketepatan Penerima Program

Penyesuaian program dengan kebutuhan kelompok masyarakat tertentu ialah faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Makin sesuai sasaran penerima dengan kriteria yang ditentukan, maka tujuan program akan lebih mudah tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketepatan penerima Program Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru dinilai cukup efektif, meskipun jumlah penerima masih terbatas akibat keterbatasan kuota. Sementara itu, di Desa Teluk Sari, pemerintah desa berupaya mengusulkan masyarakat yang memenuhi kriteria namun belum menerima bantuan ke dalam program bantuan sosial lainnya sebagai bentuk alternatif penanganan.

b. Mekanisme Penentuan Sasaran

Mekanisme penentuan sasaran ialah proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan jika penyaluran bantuan sesuai dengan rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan jika mekanisme penentuan sasaran masih tergolong kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur yang berlaku serta kurangnya transparansi dalam proses penetapan penerima bantuan, sehingga menimbulkan persepsi ketidaktepatan sasaran di kalangan masyarakat.

3. Tepat waktu

berkaitan dengan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Uang, khususnya dalam penggunaan waktu selama proses pelaksanaan program. Indikator ini menilai apakah tiap tahapan program sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.

a. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyaluran

Ketepatan waktu pelaksanaan penyaluran bantuan bertujuan untuk memastikan jika program berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disusun, termasuk dalam penentuan jadwal penyaluran bantuan sosial uang pada tiap tahapannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ketepatan waktu penyaluran Program Bantuan Sosial Uang masih tergolong kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh masih sering terjadinya keterlambatan pencairan dana pada tiap tahap penyaluran, sehingga bantuan tidak selalu diterima tepat waktu oleh masyarakat penerima.

b. Proses Pelaksanaan Program

Proses pelaksanaan program menunjukkan sejauh mana pelaksanaan Program Bantuan Sosial Uang berjalan sesuai dengan rencana awal atau mengalami perubahan selama pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan jika proses pelaksanaan program dinilai cukup efektif. Hal ini tercermin dari mekanisme penyaluran bantuan yang dilakukan secara langsung ke rumah penerima, sehingga mempermudah masyarakat dalam menerima bantuan serta mengurangi hambatan dalam proses distribusi.

4. Tercapainya Tujuan

Hasil penelitian menunjukkan jika Program Bantuan Sosial Uang di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari, sudah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Tingkat pencapaian tujuan program dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan program mampu memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang direncanakan.

a. Tercapainya Tujuan Program

Tercapainya tujuan program menunjukkan jika mencerminkan keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Uang dalam mewujudkan dampak dan manfaat sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan jika tercapainya tujuan program di Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari dinilai cukup efektif. Bantuan yang diberikan mampu membantu masyarakat penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, meskipun jumlah bantuan yang diterima belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga.

b. Sesuai dengan harapan program

Kesesuaian dengan harapan program menunjukkan sejauh mana Program Bantuan Sosial Uang dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal dan mampu memberikan manfaat yang diharapkan oleh masyarakat penerima.

Hasil dari wawancara dan observasi tentang kesesuaian harapan program cukup efektif, meskipun bantuan yang diberikan belum mampu mengubah kondisi ekonomi keluarga secara menyeluruh.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata ialah indikator untuk menilai dampak Program Bantuan Sosial Uang terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan jika program ini memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat penerima di Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari.

a. Dampak dari Program

Dampak dari program Dampak program tercermin dari adanya perubahan kondisi ekonomi masyarakat penerima sesudah memperoleh bantuan. Program Bantuan Sosial Uang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dan meringankan beban pengeluaran rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dampak program dinilai cukup efektif dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, meskipun dampak tersebut masih bersifat sementara.

b. Kebermanfaatan program

Kebermanfaatan program menunjukkan sejauh mana bantuan yang diberikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima.

Hasil dari wawancara dan observasi tentang kebermanfaatan program cukup efektif, karena belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

B. “Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari)”

Faktor-faktor berikut ini diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi Program Bantuan sosial uang di Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara:

1. Faktor Pendukung

Pada penelitian ini Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Program bantuan sosial uang belum sepenuhnya berjalan efektif, sebab hal sebagai berikut:

a. kerja sama dan koordinasi yang baik antar pendamping sosial dan pemerintah desa

Kerja sama dan koordinasi yang baik antara pendamping sosial dan pemerintah desa ialah salah satu faktor utama yang mendukung kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari. Sinergi antar pelaksana memungkinkan tiap tahapan program dapat berjalan secara terkoordinasi..

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, koordinasi dilakukan secara rutin pada tiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari proses pendataan, verifikasi data, hingga penyaluran bantuan pada masyarakat penerima. Kondisi ini menunjukkan jika kerja sama yang terjalin dengan baik berkontribusi positif terhadap efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial uang.

b. Adanya struktur dan pembagian peran pelaksana program

Struktur organisasi dan pembagian peran pelaksana program yang jelas juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Uang. Pembagian peran antara Dinas Sosial, pendamping sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan pemerintah desa sudah ditetapkan sesuai dengan fungsi masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan jika tiap pelaksana terlibat aktif dalam menjalankan tugasnya, mulai dari pendataan calon penerima, proses verifikasi, hingga penyaluran bantuan. Kejelasan struktur dan pembagian peran ini memudahkan koordinasi serta mendukung kelancaran pelaksanaan program di Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari.

2. Faktor-faktor yang Menghambat

Faktor penghambat efektivitas ialah kondisi atau situasi yang dapat mengurangi keberhasilan pelaksanaan suatu program, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas Program Bantuan Sosial Uang di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus: Desa Teluk Baru dan Desa Teluk Sari), yakni:

a. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program bantuan sosial uang

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Program Bantuan Sosial Uang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya kegiatan sosialisasi serta kurangnya informasi yang disampaikan oleh pihak pelaksana pada masyarakat..

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, minimnya sosialisasi menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur, kriteria penerima, serta mekanisme

penetapan penerima bantuan. Hal tersebut berdampak pada munculnya ketidaktahuan dan kesalahpahaman masyarakat terhadap pelaksanaan program bantuan sosial uang.

b. Ketidak tepatan waktu penyaluran

Ketidaktepatan waktu penyaluran bantuan sosial uang juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas program. Pelaksanaan penyaluran bantuan tidak selalu berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan jika keterlambatan penyaluran bantuan disebabkan oleh proses pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang belum berjalan secara optimal, serta belum adanya jadwal penyaluran bantuan yang jelas. Kondisi ini menyebabkan bantuan tidak dapat diterima masyarakat tepat waktu sesuai dengan kebutuhan mereka.

c. Terbatasnya kuota penerima

Terbatasnya kuota penerima Program Bantuan Sosial Uang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program, karena masih terdapat masyarakat yang membutuhkan namun belum dapat menerima bantuan. Kondisi ini berpengaruh terhadap persepsi keadilan di kalangan masyarakat, sehingga diperlukan pemetaan serta penetapan prioritas penerima yang lebih tepat agar program dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap Program Bantuan Sosial Uang menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan program. Kondisi ini menyebabkan masih adanya masyarakat yang membutuhkan namun belum memperoleh bantuan, sehingga berdampak pada tingkat kepuasan serta persepsi keadilan terhadap program. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan dan penetapan prioritas penerima yang lebih tepat agar penyaluran bantuan dapat berlangsung secara efektif dan berkeadilan.

SIMPULAN

Hasil Penelitian menunjukkan jika Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang tergolong cukup efektif. Hal ini berdasarkan: *pertama*, pemahaman masyarakat terhadap program masih rendah akibat minimnya sosialisasi, meskipun koordinasi pelaksana program relatif berjalan cukup efektif. *Kedua*, ketetapan penerima program di desa teluk baru dan desa teluk sari cukup efektif. Sementara mekanisme penentuan sasaran secara umum masih belum optimal. *Ketiga*, ketetapan waktu penyaluran bantuan dinilai kurang efektif. sementara dalam proses pelaksanaan program cukup efektif. *Keempat*, tercapai tujuan program dan kesesuaian hasil dengan harapan program cukup efektif, meskipun belum mampu mengubah kondisi ekonomi keluarga secara menyeluruh. *Kelima*, dampak program dan kebermanfaatannya bagi penerima program cukup efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program bantuan sosial uang di antaranya, faktor pendukung : Kerja sama dan koordinasi yang baik antar pelaksana serta pembagian peran yang jelas. Sedangkan faktor penghambatnya: rendahnya pemahaman masyarakat, keterlambatan penyaluran bantuan dan keterbatasan kuota penerima akibat keterbatasan anggaran. Untuk meningkatkan efektivitasnya, Kepala pemerintah kabupaten mengevaluasi kebijakan kuota penerima agar ketepatan sasaran program lebih optimal, kepala Dinas Sosial mengoptimalkan pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional dan kejelasan jadwal penyaluran bantuan, serta Kepala pemerintah desa diharapkan meningkatkan sosialisasi Program Bantuan Sosial Uang pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia Adhandayani, S.Psi., M. S. (2020). *Tipe-tipe Penelitian dan Metode Pengumpulan Data*.

Amrizal, D., Dalimunthe, A. H., & Yusriati. (2018). *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan*



Pemilu Legislatif dan Pilkada.

Dr. Drs. Kurhayadi, M. S., & Dr. Deden Hadi Kusnandar, S.Si., M. S. (2023). *Kebijakan dan Pelayanan Publik.*

Hidayat, R., Arpandi, & Maryati, A. (2025). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Panangkalaan Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(3), 1330–1340.

Ida Syafriyani, S.Sos., M. S. (2023). *Buku Ajar Kebijakan Publik.*

Monica Feronica Bromasa, S.Sos., M. S. (2022). *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja.*

Muh. Yusri Abadi, SKM, M. K., Dian Saputra Marzuki, SKM, M. K., Suci Rahmadani, SKM, M. K., Muhammad Al Fajrin, SKM, M. K. ., Arvina Pebrianti HR, S., Rima Eka Juliarti, S., & Asifa, S. (2021). *Efektivitas Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar.*

Normila, Dharma, A. S., & M.Husaini. (2024). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(4), 823–833.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, 1 (2017).

Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 1 (2009).